

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian, Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Anandya, Diky et al., 2023, *Mendudukkan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule dalam Perkara Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan.

Asikin, H. Zainal, 2014, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Boen, Hendra Setiawan, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2019, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Danil, Elwi, 2021, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Christiawan, Rio, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, Yahya, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Haris, Freddy, dan Teddy Anggoro, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Hiariej, Eddy O.S., dan Santoso, Topo, 2025, *Anotasi KUHP Nasional*,

Rajawali Pers, Depok.

Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan*

Perundang-undangan, dan Yurisprudensi, Kreasi Total Media,

Yogyakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku*

Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, KPK, Jakarta.

Lamintang, P. A. F., dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-*

Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1995 *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi*

Keempat. Liberty, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press,

NTB.

Pramono, Nindyo, 2024, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta

Timur.

Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis, 2018, *Pengantar Ilmu*

Hukum, Rajawali Pers, Depok.

Rusli, Tami, 2017, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Anugrah Utama

Raharja, Lampung.

Santoso, Lukman, dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Sejarah*,

Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum,

Setara Press, Malang.

Soekanto, Soerjono, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif:*

Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.

Suteki, dan Galang Taufani, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,*

Teori, dan Praktik), Rajawali Pers, Depok.

Tan, Huang, Dhillon, dan Tan (eds), 2025, *Practical PIL: Public*

International Law and its Implications for Businesses, Jus Mundi,

Perancis.

B. Artikel Jurnal

Arrozi, Fakhruddin. “Perbuatan Melawan Hukum Materiil Menurut Hakim

Pengadilan Negeri Kepanjen,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan*

Pembangunan Islam 4, no. 1 (April 2014).

Muflihun, Abdul et al. “Legal Politics of Corporate Responsibility in

Indonesia's Criminal Law,” *UNRAM Law Review* 3, no. 2 (Oktober

2019).

Sumarto dan Rahadian, Yah. “Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara dalam Membantu Penanganan Kasus

Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* 12, no. 1 (2020).

Noviana. “Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum,” *Jurist-*

Diction 3, no. 2 (Maret 2020).

Suta, I Made Gemet Dananjaya et al. “Determining State's Financial Losses

in Corruption: An Institutional Power and Constraint in Indonesia,”

Lentera Hukum 8, no. 1 (2021).

Butt, Simon. "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and democratising Indonesian Criminal Law?," *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023).

Suhendra, Maman et al. "The Challenges and Opportunities of Small-Scale Public Private Partnership Scheme to Finance Indonesia Local Street Lighting Equipment Projects: The Case of the Madiun Regency," *Ilomata International Journal of Management* 4, no. 4 (Oktober 2023).

Pardamean, Michael Christoper. "Pertanggungjawaban Direksi atas Tindak Pidana Korporasi," *UNNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023).

Gustian, Leo et al. "Inconsistency of Laws on Eradication of Corruption in Indonesia," *Eksekusi: Journal of Law* 6, no. 2 (2024).

Hakim, Lukman. "The Problem of The Authority to Determine the Financial Losses of the State on State Owned Enterprises (BUMN)," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (Juni 2024).

Adam, Chelsea Kairadinda, et al. "Analisis Hukum Tanggung Jawab dan Implikasi Persekutuan: Studi pada Persekutuan Perdata, Firma, dan CV," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (Desember 2024).

Listiyapuji, Fona Kartika et al. "Shifting Meaning of State Losses in BUMN Based on the Business Judgment Rule Principle," *Rechtenstudent Journal* 6, no. 2 (2025).

Harianto, Budi. "Kerugian Keuangan Negara Diakibatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Keuangan Negara,"

Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 3, no. 4 (April–Juni 2025).

C. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Hendratmoko, A. Suryo. “Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* terhadap Aktivitas Bisnis Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Tesis, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022.

Salmi, Erik. “Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Doktrin Aturan Penilaian Bisnis (*Business Judgement Rule*) terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).” Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023.

Winalda, Evita Maulidya. “Perkembangan Penerapan *Business Judgment Rule* di Indonesia terhadap Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sejak Putusan Kasasi No. 417 K/Pid.Sus/2014.” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023.

Diansyah, Febri. “Tanggung-Jawab Hukum Direksi BUMN terhadap Kerugian Perusahaan Berdasarkan Prinsip *Risk Play-Out Limitation* dan Doktrin *Business Judgment Rules* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2025.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah

dengan Badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E. Peraturan Lainnya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksaan Keuangan.

F. Internet

Mulyana, Asep N. “*Business Judgment Rule Versus Tindak Pidana Korupsi*,” Media Indonesia.

<https://mediaindonesia.com/opini/189924/business-judgment-rule-versus-tindak-pidana-korupsi>.

Fahriyadi. “Alex Denni Dinilai Menjadi Korban Kriminalisasi di Kasus PT

Telkom,” Kontan.co.id.

<https://nasional.kontan.co.id/news/alex-denni-dinilai-menjadi-korban-kriminalisasi-di-kasus-pt-telkom>.

G. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN

Jkt.Pst perihal perkara tindak pidana korupsi Joko Hartono Tirto.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid.Sus-

TPK/2021/PT.DKI perihal perkara tindak pidana korupsi Joko Hartono Tirto.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 perihal Kasasi perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2677 K/Pid.Sus/2022 perihal perkara tindak pidana korupsi Joko Hartono Tirto.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1460/PID/B/2006/PN.BDG

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 166/Pid/2008/PT.Bdg perihal perkara tindak pidana korupsi Alex Denni.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 163 K/Pid.Sus/2013 perihal perkara tindak pidana korupsi Alex Denni.

Putusan Peninjauan Mahkamah Agung Nomor 1091 PK/Pid.Sus/2025

perihal perkara tindak pidana korupsi Alex Denni.